

**JURNAL PROSIDING
ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DHARMAWANGSA**

**Politik Identitas Etnis dalam Pilkada Pemilihan Walikota dan
Wakil Walikota**

Nur Ainun ,Nur Indah, Fandi Alfiansyah Siregar
Administrasi Publik, Fakultas ISIP, Universitas Dharmawangsa, Indonesia
nurainun@gmail.com

Abstrak

Fokus penelitian adalah melihat keterlibatan politik identitas etnis dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota. Metode antropologi politik digunakan dengan pendekatan fungsionalis yang pendekatannya dibangun antara klan-klan dan berdasarkan garis-garis keturunan etnis yang memungkinkan adanya hubungan politik dengan kelompok maupun organisasi etnis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam (depth interview), pengamatan (observasi) dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis data deskriptif kualitatif. Populasinya adalah masyarakat dari beberapa etnis yaitu 120 orang. Sampel dalam penelitian ini diambil secara random sampling 20% dari jumlah populasi yaitu 24 orang dan partai politik yang mengusung calon yakni partai Demokrat dan PKS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan dari etnis memiliki pengaruh dalam hal untuk menjadi sumber suara. Hubungan identitas etnis menjadi pertimbangan dalam menentukan pilihan pemilih. Keberadaan kelompok-kelompok etnis mampu dimanfaatkan oleh pasangan calon dengan cara menggunakan pendekatan-pendekatan sebagai tempat atau basis mendulang suara. Adanya hubungan kekerabatan antar etnis yang terjadi dari pendekatan tersebut juga menjadi alasan masyarakat untuk memilih. Selain itu terdapat dukungan dari etnis seperti mensosialisasikan kembali dan mengajak keluarga untuk memilih salah satu pasangan calon. Sementara itu dari adanya identitas-identitas etnis tersebut menjadi sebuah kekuatan politik untuk mendapat dukungan suara.

Kata Kunci: Politik Identitas, Identitas Etnis, Pemilihan Kepala Daerah

Abstract

The focus of the research is to see the involvement of ethnic identity politics in the election of Mayor and Deputy Mayor. The political anthropology method is used with a functionalist approach whose approach is built between clans and based on ethnic lineages that allow for political relations with ethnic groups and organizations. Data collection techniques were carried out using in-depth interviews, observations and documentation. The data analysis technique used descriptive qualitative data analysis. The population is people from several ethnic groups, namely 120 people. The sample in this study was taken by random sampling 20% of the total population, namely 24 people and the political parties that carried the candidates, namely the Democratic Party and PKS. The results show that the involvement of ethnicity has an influence in terms of being a source of voice. The relationship of ethnic identity is a consideration in determining voter choices. The existence of ethnic groups can be exploited by candidate pairs by using approaches as a place or basis for gaining votes. The existence of inter-ethnic kinship that occurs from this approach is also the reason for the community to choose. In addition, there is support from ethnic groups such as re-socializing and inviting families to choose one of the candidate pairs. Meanwhile, the existence of these ethnic identities becomes a political force to gain support for votes.

Keywords: *Identity Politics, Ethnic Identity, Regional Head Election*

Pendahuluan

Demokrasi menurut Sakti (2012) merupakan bentuk pemerintahan dimana kebijakan secara langsung atau tidak langsung ditentukan oleh suara terbanyak dari warga masyarakat yang memiliki hak untuk memilih dan dipilih, melalui wadah pembentukan suaranya dalam keadaan bebas dan tanpa paksaan. Demokrasi berarti pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat, baik secara langsung maupun tidak langsung setelah adanya proses pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Dalam sistem politik Indonesia yang menganut paham demokrasi, rakyat dipandang sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, terlihat dari pemilihan umum secara langsung yang dimana rakyatlah yang memilih langsung orang yang akan duduk untuk memimpin pemerintahan sesuai dengan periode yang berlaku saat ini. Untuk itu demokrasi harus membuahkan hasil yang nantinya bisa dirasakan sendiri oleh rakyat, seperti kesejahteraan meningkat, penyelenggaraan negara yang lebih baik, juga ketentraman yang dirasakan masyarakat terjamin.

Sakti (2012) menyebutkan aspek penting dari adanya suatu demokrasi yaitu partisipasi politik. Asumsi yang mendasari demokrasi (partisipasi) adalah orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri. Karena keputusan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara, maka rakyat berhak untuk ikut serta menentukan isi keputusan yang mempengaruhi pembuatan dan pelaksanaan keputusan

politik. Partisipasi politik merupakan salah satu indikator dalam suatu lingkup negara yang menganut sistem demokrasi. Artinya suatu negara bisa dikatakan sebagai negara demokrasi apabila pemerintah yang berkuasa memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga negaranya untuk berpartisipasi dalam politik.

Dalam partisipasi masyarakat yang melakukan pemilihan, Sitepu (2012) berpendapat bisa dipengaruhi oleh faktor sosiologis terhadap perilaku pemilih yakni kelas sosial, ekonomi, agama, etnis, gender, dan juga aspek daerah tempat tinggal. Ada beberapa faktor utama yang membentuk pengaruh partisipasi di Indonesia salah satunya adalah faktor etnis. Kelompok etnis mempunyai peranan besar dalam membentuk sikap, persepsi, dan orientasi perseorangan. Dengan adanya rasa kesukuan atau kedaerahan tersebut sehingga dapat mempengaruhi dukungan seseorang terhadap suatu partai politik. Etnis juga dapat mempengaruhi loyalitas terhadap partai tertentu.

Pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat merupakan perwujudan dari pengembalian hak-hak dasar rakyat dalam milih pemimpin daerah. Rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam politik baik untuk memilih maupun dipilih karena setiap warga negara memiliki akses penuh terhadap setiap kegiatan politik.

Dengan beragamnya identitas etnis yang ada di Binjai, terjadi persaingan antar etnis dalam momentum pilkada, dimana para calon menggunakan simbol identitas etnisnya untuk ditampilkan bahwa ia ingin menunjukkan kepada masyarakat yang memiliki kesamaan etnis dengannya untuk membangun eksistensi dari kelompok etnis tersebut. Dengan usaha seperti itu, para calon mengharapkan masyarakat memberikan kepercayaannya bahwa harus ada wakil dari kelompok etnis itu untuk menduduki jabatan kekuasaan.

Sebagai elit politik yang ingin menadapatkan tempat kekuasaan pada suatu daerah yang dapat memanfaatkan dari adanya kelompok-kelompok etnis yang ada. Maka untuk menarik perhatian dan mendapatkan dukungan dari masyarakat, para kandidat melakukan pendekatan- pendekatan dengan perkumpulan dari kelompok etnisnya sendiri maupun dengan kelompok etnislain, dengan begitu masyarakat yang berasal dari etnis lain merasa adanya kedekatan dan kepercayaan terhadap pasangan calon, dengan tujuan untuk mendapatkan dukungan dari suku lain.

Dengan pendekatan politik simbolis tersebut para kandidat akan mendapatkan respons yang baik dari masyarakat, untuk mendapatkan respons simbolis dapat menggunakan identitas etnis, agama, dan kelompok-kelompok partisipan yang diikuti, dengan harapan simbol-simbol tersebut bisa mempengaruhi kelompok-kelompok yang ada. Para kandidat mengembangkan pemasaran politik untuk memasarkan dirinya maupun idenya biasanya dengan menggunakan ideologi ras atau etnisitas yang dirangkum dalam pesan politik sebagai sebuah strategi pemasaran dalam sebuah

kegiatan pemilihan.

Dengan adanya kontestasi politik tersebut menimbulkan sebuah ketegangan etnis untuk bersaing dalam pemilihan kepala daerah tersebut. Pada pemilihan kepala daerah juga terlihat rasa solidaritas etnis yang melibatkan peranan tokoh masyarakat, tokoh adat dan kelompok kesukuan sebagai suatu gerakan politik dan etnis tersebut dijadikan sebagai obyek kepentingan politik mereka.

Landasan Teori

1. Politik Identitas

Dewasa ini politik identitas bukanlah sebuah hal baru dalam perhelatan pemilihan kepala daerah. Mobilisasi pemilihan yang didasarkan pada kesamaan identitas suku, agama, wilayah, budaya, dan bahasa merupakan hasil dari pilkada secara langsung. Dalam perjalanannya identitas yang dimiliki oleh setiap individu tidak terlepas dari kelompok masyarakat dimana individu tersebut berinteraksi.

Secara teoritis politik identitas merupakan sesuatu yang bersifat hidup atau ada dalam setiap etnis, dimana keberadaannya bersifat laten dan potensial, dan sewaktu-waktu dapat muncul ke permukaan sebagai kekuatan politik yang dominan. Secara empiris, politik identitas merupakan aktualisasi partisipasi politik yang terkonstruksi dari akar budaya masyarakat setempat, dan mengalami proses internalisasi secara terus menerus di dalam kebudayaan masyarakatnya dalam suatu jalinan interaksi sosial.

Perbedaan politik identitas di Indonesia menjadi penting untuk dikaji sebagai upaya menarik benang merah dari perbedaan yang ada sehingga stabilitas politik tetap terjaga. Sebagai negara yang dilatarbelakangi oleh berbagai keanekaragaman, Indonesia telah membuktikan dari zaman kemerdekaan hingga saat ini kesatuan dapat dipelihara. Uraian mengenai politik identitas tidak terlepas dari makna identitas itu sendiri. Suparlan (2004: 25) mengartikan identitas atau jati diri sebagai pengakuan terhadap seorang individu atau suatu kelompok tertentu yang menjadi satu kesatuan menyeluruh yang ditandai dengan masuk atau terlibat dalam satu kelompok atau golongan tertentu.

Cressida Heyes (2007) mendefinisikan politik identitas sebagai penandaan aktivitas politis dalam pengertian yang lebih luas dan teorisasi terhadap ditemukannya pengalaman ketidakadilan yang dialami oleh anggota-anggota dari kelompok-kelompok sosial tertentu.

Manuel Castells mengatakan, bahwa politik identitas merupakan partisipasi individu dan lebih ditentukan oleh budaya dan psikologis seseorang. Jika proses pembentukannya dalam kondisi

tertekan (identitas resisten) dengan adanya dominasi pihak lain, maka akan muncul identitas yang dalam peristilahan Calhoun disebut politik identitas.

Secara teoritis politik identitas menurut Lukmantoro adalah politis untuk mengedepankan kepentingan-kepentingan dari anggota-anggota suatu kelompok karena memiliki kesamaan identitas atau karakteristik, baik berbasiskan pada ras, etnisitas, jender, atau keagamaan.

Politik identitas merupakan politik yang fokus utama kajian dan permasalahannya menyangkut perbedaan-perbedaan yang didasarkan atas asumsi-asumsi fisik tubuh seperti persoalan politik yang dimunculkan akibat problematika gender, feminisme dan maskulinisme, persoalan politik etnis yang secara dasarnya berbeda fisik dan karakter fisiologis, dan pertentangan-pertentangan yang dimunculkannya, atau persoalan-persoalan politik karena perbedaan agama dan kepercayaan dan bahasa.

Kemunculan politik identitas dibentuk oleh identitas legitimasi (legitimizing identity); identitas resisten (resistance identity); identitas proyek (project identity).

2. Identitas Etnis

Identitas memiliki dua pengertian. Pertama, merujuk pada suatu yang melekat dalam diri seseorang. Kedua, merupakan surat keterangan atau riwayat hidup seseorang. Identitas didapat melalui dua sumber, yakni aturan-aturan sosial yang menjelaskan tentang tingkah laku tertentu dan sejarah hidup seseorang. Menurut Hank Johnston (dalam Adrian, 2013) mengatakan bahwa identitas dibagi menjadi dua yaitu identitas individu dan identitas kolektif.

1) Identitas individu,

Identitas individu merupakan suatu identitas yang dikaitkan dengan siapa dan bagaimana seseorang diakui dalam masyarakat terlepas dari ketergantungannya dari orang lain.

2) Identitas kolektif,

Identitas kolektif diperoleh seseorang berkat adanya interaksi yang terjadi antara individu. Identitas kolektif dinilai dari kesungguhan individu dalam menjalin kerjasama dan membangun keterdekatan antar sesama.

Identitas etnik menurut McNeill (2011) mencakup konsep diri dan identifikasi diri, suatu perasaan memiliki, dan sikap positif dan negatif terhadap kelompok etnis seseorang. Identitas etnik adalah aspek budayasi berfokus pada perasaan subjektif dari suatu kelompok atau budaya (Phinney, 1990). Aspek budaya dalam identitas etnis meliputi bahasa, perilaku, nilai-nilai, dan pengetahuan tentang sejarah kelompok etnis (Phinney, 1990).

Identitas etnis seseorang menurut pendapat Sjamsuddin (2015) akan melahirkan dimensi

psikologis antara kesadaran etnis dimana seseorang menyadari bahwa dirinya memiliki etnis sendiri yang berbeda dengan orang lain. Identifikasi diri etnis berupa label yang diberikan pada kelompoknya, dapat pula melahirkan sikap etnis berupa perasaan tentang dirinya dan kelompok lain, serta tingkah laku etnis, tingkah laku etnis ini berupa tingkah laku yang menandakan ciri khas dari kelompok etnis tersebut.

Persaingan identitas etnis menjadi aspek yang penting dalam hubungan politik. Pada dasarnya term ini muncul karena menyangkut gagasan tentang pembedaan dikotomi antara kami dan mereka dan pembedaan atas klaim terhadap dasar, asal usul dan karakteristik budaya.

Etnisitas adalah hasil dari proses hubungan, bukan karena proses isolasi. Jika tidak ada pembedaan antara orang dalam dan orang luar, tidak ada namanya etnisitas.

Identitas etnis menurut Phinney (2007) memiliki beberapa komponen, berikut ini adalah komponen identitas etnis:

1. Identifikasi diri dan label diri, yaitu individu mengidentifikasi diri sebagai anggota kelompok sosial tertentu. Pengukuran etnis identitas harus dimulai dengan memverifikasi bahwa individu sedang belajar mengidentifikasi diri sebagai anggota kelompok tertentu.
2. Komitmen, merujuk pada rasa memiliki dimana individu memiliki keterikatan yang kuat terhadap kelompok etnis yang dimiliki.
3. Eksplorasi, yaitu individu berupaya untuk mencari informasi dan pengalaman relevan dengan etnis seseorang, eksplorasi dianggap penting karena membentuk identitas etnis pada individu.
4. Perilaku etnis, merupakan semua tindakan khas yang mencerminkan suatu etnis tertentu.
5. Evaluasi dan sikap ingroup, evaluasi seseorang terhadap kelompok etnisnya, baik positif atau negatif.
6. Nilai dan keyakinan, Nilai dan keyakinan yang dimiliki etnis dan diyakini individu adalah indikator penting dari kedekatan seseorang ke grup.
7. *Importance and Salience*, Ada variasi luas dalam arti penting dikaitkan dengan identitas etnis seseorang antar individu dan kelompok.
8. Identitas etnis atau identitas nasional, agar identitas etnis dipahami sepenuhnya, sebaiknya dipertimbangkan dalam kaitannya dengan identitas kelompok lain dari anggota kelompok minoritas, yaitu identitas mereka sebagai bagian dari kebangsaan mereka.

Dari berbagai pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa identitas etnis adalah perasaan yang menunjukkan eksplorasi dan komitmen terhadap latar belakang etnisnya. Dimana terdapat dua komponen yaitu komponen eksplorasi dan komponen komitmen. Sehingga karakteristik identitas etnis dapat dilihat melalui bagaimana individu mencari tahu informasi mengenai etnis, pengalaman

individu dalam memahami latar belakang etnis, pengalaman individu dalam mempelajari kelompok etnis, perasaan yang kuat terhadap etnis, keterikatan individu terhadap kelompok etnis, dan makna anggota kelompok etnis bagi individu tersebut.

Hasil Dan Pembahasan

Hubungan Identitas Etnis

Adanya hubungan identitas etnis yang dimiliki dapat menjadi pengaruh seseorang dalam pilihan politiknya. Dengan adanya hubungan identitas etnis tersebut masyarakat dari berbagai etnis masih menjadikan etnis sebagai sebuah pertimbangan untuk menjadikan pilihan politiknya pada pemilihan walikota.

Dalam pemilihan kepala daerah, identitas etnis dapat dijadikan sebagai kajian oleh partai politik dalam menentukan pasangan calon pada saat pemilihan kepada daerah, sebagai partai pendukung dari pasangan calon penggunaan identitas etnis dikaji untuk tujuan memenangkan pasangan calon yang didukung tersebut, adanya sebuah strategi yang dilakukan oleh partai pendukung dengan menggunakan identitas etnis yaitu untuk menjadikan sebagai pasangan calon.

Keberadaan dari identitas etnis yang dimiliki oleh seorang calon dapat digunakan sebagai strategi untuk mendapat dukungan suara, dengan keberagaman etnis dimanfaatkan dengan menjadikan pasangan calon yang berasal dari latar belakang etnis yang berbeda dan juga dari latar belakang keluarga yang memiliki perbedaan etnis.

Kekerabatan Etnis

Dengan adanya interaksi dan komunikasi dengan kelompok identitas etnis lain akan tercipta rasa empati, solidaritas sehingga membentuk kekerabatan yang dekat. Maka dari adanya hubungan kekerabatan, juga dapat mempengaruhi pilihan dari masyarakat.

Masyarakat juga dapat dipengaruhi dengan adanya hubungan kekerabatan yang dijalankan oleh pasangan calon kepada setiap etnis, adanya hubungan kekerabatan yang terjalin antara masyarakat dengan calon dapat menjadikannya sebagai pilihan, jadi masyarakat juga memilih atas dasar adanya sistem kekerabatan.

Kekuatan Politik

Sebagai kekuatan politik, Brubaker (Ishiyama dan Breuning, 2013) melihat bahwa identitas etnis adalah salah satu kekuatan besar yang membentuk sikap politik dan perilaku politik massa. Dari adanya hubungan kekerabatan yang dibangun dengan setiap etnis dapat dijadikan sebagai kekuatan politik untuk memperoleh suara dari luar etnis yang dimiliki oleh masing-masing pasangan

calon walikota dan wakil walikota. Dengan begitu, keberadaan dari etnis dapat menjadi sumber kekuatan untuk mendulang suara dengan adanya hubungan kekerabatan.

Organisasi atau Kelompok Etnisitas

Organisasi ataupun kelompok etnis yang dibentuk atas dasar kesamaan etnis yang dimiliki, identitas etnis dapat dijadikan sebagai sumber dan sarana politik, maka dengan adanya organisasi ataupun kelompok etnis itu menjadi sarana bagi setiap pasangan calon untuk menarik perhatian anggota masyarakat dari setiap etnis. Bourdieu (dalam Hapsa dan Purnomo 2016: 130 Vol 3 No.1 Februari) melihat bahwa identitas etnis merupakan hasil dan modal konstruksi sosial yang dibangun antar obyek.

Beragamnya identitas etnis yang membentuk pembagian sebuah kelompok-kelompok berdasarkan etnis yang dapat menjadi sebuah wadah oleh pasangan calon untuk kembali menarik perhatian masyarakat yang ada pada kelompok etnis itu sendiri dengan cara mereka masing-masing.

Dengan adanya kelompok-kelompok ataupun perkumpulan-perkumpulan yang dimiliki dari setiap identitas etnis, dapat dimanfaatkan oleh setiap pasangan calon sebagai tempat untuk mendapatkan dukungan-dukungan yang diberikan dari kelompok etnis.

Setiap pasangan calon berusaha mencari dukungan dari setiap etnis untuk menjadi salah satu modal yang dibutuhkan. Oleh karena itu, masyarakat yang berasal dari kelompok-kelompok etnis memberikan dukungannya terhadap pasangan calon berdasarkan dari kedekatan-kedekatan antar etnis.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan identitas etnis masih berpengaruh terhadap pilihan politik masyarakat pada pemilihan walikota dan wakil walikota, latar belakang kekuatan identitas etnis dari pasangan calon juga mempengaruhi dan dapat diartikan politik identitas merupakan politik yang fokus utama kajian dan permasalahannya menyangkut perbedaan-perbedaan, dan identitas etnis adalah perasaan yang menunjukkan eksplorasi dan komitmen terhadap latar belakang etnisnya.

Saran

Menyadari bahwa jurnal ini masih banyak kekurangan, masih ada beberapa penjelasan yang belum dijelaskan secara rinci. Saya sebagai penulis menyadari beberapa kekurangan tersebut, saya sebagai penulis menerima kritik dan saran dari pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

Nasrudin, Juhana. 2018. "Politik Identitas dan Representasi Politik". *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama*. Vol. 1. No. 1 (34-47). Bandung: UIN Sunan Gunung Djati.

Lestari, Yeni Sri. 2018. "Politik Identitas di Indonesia" *Journal of politics and Policy*. Vol. 1. No.1 Aceh Barat: Universitas Teuku Umar.

Sagala, Ivan Devi. Mukmin, Budi Ali. 2018. "Politik Identitas Etnis dalam Pilkada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Binjai Tahun 2015. *Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya*. Vol. 4. No. 1 (139-151). Medan: Universitas Negeri Medan.